

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan anggaran merupakan suatu elemen krusial dalam sistem manajemen keuangan sebuah organisasi. Proses ini tidak hanya mencakup perencanaan dan distribusi sumber daya, tetapi juga membutuhkan pengawasan yang teliti guna menjamin bahwa pemanfaatan anggaran berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Mkuhlana & Jowah, 2022). Dalam konteks ini, keberadaan sistem *monitoring* realisasi anggaran yang efisien memiliki peran penting dalam mendorong transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung efisiensi dalam pengelolaan keuangan sektor publik.

Secara yuridis, pengelolaan anggaran tunduk pada berbagai ketentuan hukum, di antaranya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut membentuk kerangka kerja yang terstruktur bagi pengelolaan anggaran, mencakup prosedur pelaporan serta mekanisme pertanggungjawaban yang wajib dipatuhi oleh instansi pemerintah. Dengan adanya aturan ini, potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah pun meningkat (Andriasari & Prabowo, 2022).

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Barat menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan anggaran, seperti keterlambatan pelaporan, keterbatasan akses terhadap data anggaran, serta potensi kesalahan dalam pencatatan. Permasalahan tersebut tidak hanya menghambat pengambilan keputusan secara tepat waktu, tetapi juga berdampak pada menurunnya tingkat akuntabilitas.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dibutuhkan rancang bangun sistem *monitoring* realisasi anggaran berbasis *website* yang disesuaikan dengan kebutuhan BPS Kabupaten Bandung Barat. Implementasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional melalui alur pencatatan yang lebih rapi dan terstruktur, serta memudahkan proses pelacakan dokumen fisik yang telah diterima.

meskipun tidak menggantikan dokumen fisik, sistem ini memudahkan koordinasi dan validasi antar pihak. Kemudahan akses sistem oleh berbagai pihak, kapan pun dan di mana pun, juga mendukung kolaborasi yang lebih efektif antar tim.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah dilakukan, salah satunya oleh Baizah dan Akbar yang membahas Sistem Informasi Realisasi Anggaran pada Dinas Pertanian Provinsi Aceh. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, masih belum terdapat kajian mendalam terkait optimalisasi fitur pemantauan *real-time* dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran (Baizah & Akbar, 2024). Penelitian lain dilakukan oleh Kanasih, Ariansyah, dan Fajriyah mengenai Aplikasi Realisasi Anggaran Dana Desa Sukarami. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan kondisi eksisting, namun belum mengevaluasi sejauh mana efektivitas integrasi data yang lebih optimal dalam pengelolaan anggaran desa, maupun pengaruhnya terhadap proses pengambilan Keputusan (Kanasih dkk., 2023). Penelitian selanjutnya oleh Lailiya, Ginantra, dan Mahendra membahas Sistem Informasi Penyesuaian Anggaran Belanja di PT. Taspen (Persero) dengan menggunakan pendekatan *waterfall*. Namun, penelitian tersebut belum mempertimbangkan fleksibilitas akses pengguna, yang sebenarnya dapat meningkatkan kemampuan sistem dalam merespons kebutuhan pengguna yang beragam (Lailiya dkk., 2022).

Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak instansi, terdapat kebutuhan akan evaluasi terhadap sistem *monitoring* realisasi anggaran berbasis *website* di BPS Kabupaten Bandung Barat. Melalui pendekatan ini, diharapkan berbagai hambatan dalam pengelolaan anggaran dapat diminimalkan secara signifikan, sekaligus mendukung proses operasional yang lebih efisien dan tertata dengan baik. Selain itu, sistem ini dirancang agar seluruh pihak yang terlibat alur pemeriksaan, yaitu *user*, PPK, Keuangan, dan *admin* dapat menjalankan proses validasi berkas secara berjenjang dan terstruktur. Setiap tindakan atau aksi yang dilakukan oleh masing-masing dapat dipantau langsung oleh *user* melalui *dashboard*. Dengan demikian, sistem ini mendukung transparansi dan efisiensi proses *monitoring* anggaran secara *real-time*, serta meningkatkan akuntabilitas antar unit kerja.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana rancang bangun sistem *monitoring* realisasi anggaran berbasis *website* menggunakan metode *Design Science Research* (DSR) di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana analisis hasil pengujian *User Acceptance Test* (UAT) dan *System Usability Scale* (SUS) terhadap sistem *monitoring* realisasi anggaran berbasis *website* di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan solusi yang diharapkan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Merancang dan membangun sistem *monitoring* realisasi anggaran berbasis *website* menggunakan metode *Design Science Research* (DSR) di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat.
2. Melakukan analisis terhadap hasil pengujian dari sistem *monitoring* realisasi anggaran berbasis *website* di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. **Bagi penulis**, penelitian ini memberikan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam melakukan perancangan sistem berbasis *website*, serta meningkatkan keterampilan dalam pengembangan perangkat lunak.
2. **Bagi pengembang**, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya dalam pengembangan sistem *monitoring* anggaran atau sistem informasi lainnya, serta memberikan kontribusi terhadap literatur di bidang teknologi informasi dan manajemen keuangan.
3. **Bagi instansi**, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan pemantauan realisasi anggaran, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik melalui sistem yang terintegrasi dan mudah diakses.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian ditetapkan agar penelitian dapat lebih terarah dan fokus dalam mencapai tujuan. Adapun ruang lingkup tersebut adalah:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada rancang bangun *website* dan tidak mencakup aplikasi *mobile* atau *platform* lainnya.
2. Penelitian ini yang dibuat hanya berfokus pada satu studi kasus yakni BPS Kabupaten Bandung Barat.
3. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini hanya data yang diberikan oleh BPS Kabupaten Bandung Barat.
4. Sistem yang dibuat hanya dapat digunakan oleh BPS Kabupaten Bandung Barat.